

ISSN 1693 - 315X

JURNAL PERMUKIMAN

natah

VOLUME 7 NOMOR 2 AGUSTUS 2009



LABORATORIUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR 2009

JURNAL PERMUKIMAN**NATAH****VOLUME 7 NOMOR 2 AGUSTUS 2009****Pelindung :**

Rektor Universitas Udayana

Penanggung Jawab :Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana
Ketua Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Udayana**Penasehat :**Ir. I Ketut Alit, MT
Ir. Ida Bagus Gede Wirawibawa Mantra, MT**Ketua Dewan Redaksi :**

Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, ST, MA

Mitra Bestari :Prof. Dr. Helmut Bott (Urban Planning and Design Specialist, Stuttgart-Germany)
Prof. Hans Steerling, PhD. (Housing and Settlement Specialist, HIS-Erasmus Univesity-Netherlands)
Prof. Dr. Joesron Alisyahbana (Planolog, UNDIP – Semarang)
Prof. Dr. Tommy Firman, MT (Planolog, ITB-Bandung)**Dewan Editor :**Prof. Dr. Ir. Sulistyawati, MS
Dr. Ir. Syamsul Alam Paturusi, MSP
Ir. Ngakan Putu Sueca, MT, Ph.D
Dr. Ir. Widiastuti, MT
Ir. Ciptadi Trimariantio, Ph.D
Ir. I Made Sukadana, MT, Ph.D**Redaktur Pelaksana :**Ni Made Yudiantini, ST, MSc.
I Dewa Gede Agung Diasana Putra, ST, MT
Ir. Aik Soewarno, M.Erg
Ir. I Made Suarya, MT
I Wayan Wiryawan, ST, MT**Alamat Redaksi :**Laboratorium Perumahan dan Permukiman
Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana
Jl. P. B. Sudirman, Denpasar-Bali
Phone (0361) 246163, 703384 Fax: (0361) 701806, 290149
E-mail: acwindwijendra@yahoo.com**Foto Depan:** Pura Dalem Segara Madhu Jagaraga Buleleng oleh I Dewa Gede Agung Diasana P ST.,MT**Foto Belakang:** Digitasi foto bangunan pada core Desa Tenganan oleh I Dewa Gede Agung Diasana Putra ST.,MT

JURNAL PERMUKIMAN "NATAH" yang terbit pertama kali **Pebruari Tahun 2003** adalah wadah informasi bidang perumahan permukiman dan arsitektur berupa hasil penelitian, studi kepustakaan maupun tulisan ilmiah terkait. Dewan Redaksi menerima artikel terpilih untuk dimuat, dengan frekuensi terbit secara berkala **2 (dua) kali setahun** yaitu **Pebruari** dan **Agustus**. Naskah yang dimuat merupakan pandangan dari penulis dan Dewan Redaksi hanya menyunting naskah sesuai format dan aturan yang berlaku tanpa mengubah substansi naskah.

PETUNJUK PENGIRIMAN NASKAH

TATA TULIS NASKAH :

1. Kategori naskah ilmiah hasil penelitian (laboratorium, lapangan, kepustakaan), ilmiah populer (aplikasi, ulasan, opini) dan diskusi.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris diketik pada kertas ukuran A-4, spasi ganda, dengan batas atas, kanan dan bawah masing-masing 3cm, sedangkan batas kiri 4 cm dari tepi kertas.
3. Batas panjang naskah/artikel maksimum 20 halaman dan untuk naskah diskusi maksimum 5 halaman.
4. Judul harus singkat, jelas tidak lebih dari 10 kata, cetak tebal, huruf kapital, ditengah-tengah kertas. Untuk diskusi, judul mengacu pada naskah yang dibahas (nama penulis naskah yang dibahas ditulis sebagai catatan kaki).
5. Nama penulis/pembahas ditulis lengkap tanpa gelar, di bawah judul, disertai institusi asal penulis dan alamat email dibawah nama.
6. Harus ada kata kunci (*keyword*) dari naskah yang bersangkutan minimal 2 kata kunci. Daftar kata kunci (*keyword*) diletakkan setelah abstrak.
7. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris maksimum 150 kata, dicetak miring, 1 spasi. Abstrak tidak perlu untuk naskah diskusi.
8. Judul bab ditulis di tengah-tengah ketikan, cetak tebal huruf kapital.
9. Gambar, grafik, Label dan foto harus disajikan dengan jelas. Tulisan dalam gambar, grafik, dan tabel tidak boleh lebih kecil dari 6 point (tinggi huruf rata-rata 1,6 mm). Gambar, grafik, dan tabel dicetak di atas kertas putih atau kalkir dengan tinta hitam. Foto dicetak pada kertas foto yang tidak mengkilat dan sedapatnya berwarna hitam putih.
10. Nomor dan judul untuk gambar, grafik, label dan foto ditulis di tengah-tengah kertas dengan huruf kapital di awal kata. Untuk nomor dan judul tabel diletakkan di atas tabel, sedangkan untuk nomor dan judul gambar, grafik dan foto diletakkan di bawah gambar, grafik dan foto yang bersangkutan.
11. Untuk segala bentuk kutipan, pada akhir kutipan diberi nomor kutipan sesuai dengan catatan kaki yang berisi referensi kutipan (nama, judul, kota, penerbit, tahun dan halaman yang dikutip). Rumus-rumus hendaknya ditulis sederhana mungkin untuk menghindari kesalahan pengetikan. Ukuran huruf dalam rumus paling kecil 6 point (tinggi huruf rata-rata 1,6 mm).
12. Definisi notasi dan satuan yang dipakai dalam rumus disatukan dalam daftar notasi. Daftar notasi diletakkan sebelum daftar pustaka.
13. Kepustakaan diketik 1 spasi. Jarak antar judul 2 spasi dan diurutkan menurut abjad. Penulisan harus jelas dan lengkap dengan susunan : nama pengarang. tahun. judul. kota: penerbit. Judul dicetak miring.

KETERANGAN UMUM :

1. Naskah yang dikirim sebanyak satu eksemplar dan menyerahkan disket naskah dalam program pengolahan kata M.S. Word atau format teks/ASCII.
2. Naskah belum pernah dipublikasikan oleh media cetak lain.
3. Redaksi berhak menolak atau pengedit naskah yang diterima. Naskah yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan akan dikembalikan. Naskah diskusi yang ditolak akan diteruskan kepada penulis naskah untuk ditanggapi.



JURNAL PERMUKIMAN

NATAH

VOLUME 7 NOMOR 2 AGUSTUS 2009

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Permukiman "Natah" Volume 7 Nomor 2 Agustus 2009 merupakan edisi keempatbelas yang bertemakan "**Keruangan, Permukiman dan Arsitektur**".

Edisi ini diawali dengan artikel yang berjudul Persepsi Terhadap Fasade Bangunan Perguruan Tinggi Di Kota Bandung oleh **Salmon Priaji Martana**. Artikel kedua adalah dari **I Made Widja** dengan judul Konteksual Warisan Budaya Dunia Taman Nasional Bali Barat Terhadap Kelestarian Jalak Putih. Artikel ketiga **Lalu Mulyadi dan Agung Murti Nugroho** dengan judul Aspek Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang. Artikel keempat dengan judul Rencana Dan Penerapan Simpang Tak Sebidang (*Interchange*) Dengan Memperhitungkan Batasan Budaya, Adat dan Teknis oleh **Putu Kwintaryana Winaya**. Artikel terakhir yang berjudul Revitalisasi Kota Lama (Suatu Kajian Teori) oleh **I Gusti Bagus Budjana**.

Redaksi sangat bersyukur kepada Tuhan karena edisi keempatbelas ini bisa terbit dengan lancar. Redaksi mengucapkan terimakasih kepada Ketua Jurusan Teknik Arsitektur atas motivasi dan masukannya untuk kesempurnaan jurnal ini serta seluruh anggota Laboratorium Perumahan dan Permukiman, Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Udayana atas kekompakan dan semangatnya. Terakhir, kritik dan saran guna kesempurnaan selanjutnya sangat kami harapkan dan kepada semua yang telah membantu penerbitan jurnal ini dan para pembaca yang budiman kami ucapkan terimakasih.

Redaksi

Alamat Redaksi

Jl. P. B. Sudirman, Denpasar-Bali

Phone (0361) 246163, 703384 Fax: (0361) 701806, 290149

E-mail: acwindwijendra@yahoo.com

**JURNAL PERMUKIMAN****NATAH**

VOLUME 7 NOMOR 2 AGUSTUS 2009

DAFTAR ISI

Persepsi Terhadap Fasade Bangunan Perguruan Tinggi Di Kota Bandung Salmon Priaji Martana	42 – 54
Konteksual Warisan Budaya Dunia Taman Nasional Bali Barat Terhadap Kelestarian Jalak Putih I Made Widja	55 - 63
Aspek Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang Lalu Mulyadi dan Agung Murti Nugroho	64 – 76
Rencana Dan Penerapan Simpang Tak Sebidang (<i>Interchange</i>) Dengan Memperhitungkan Batasan Budaya, Adat dan Teknis Putu Kwintaryana Winaya	77 - 88
Revitalisasi Kawasan Kota Lama (Suatu Kajian Teori) I Gusti Bagus Budjana	89 - 94

ASPEK PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MALANG

Oleh :

Lalu Mulyadi

Dosen Prodi Arsitektur ITN Madang

Agung Murti Nugroho

Dosen Fakultas Teknik UB Madang

Email: -

ABSTRAK

Ruang terbuka hijau dapat dipahami sebagai unsur utama dalam ekosistem kota yang terdiri atas tiga tipe utama yaitu tempat parkir kendaraan, hutan kota dan area pertanian yang mempunyai fungsi ekologi, sosial dan ekonomi. Kondisi ruang terbuka hijau di perkotaan berhubungan erat dengan pengelolaan kota itu sendiri. Dalam konteks pengelolaan, maka aspek yang masuk didalamnya penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan pengambilan keputusan secara rasional. Sehingga strategi pengelolaan ruang terbuka hijau merefleksikan rangkaian kebijakan strategis dan operasionalisasi keputusan.

Pada kasus Kota Malang, secara keseluruhan strategi pengelolaan ruang terbuka hijau sepenuhnya berdasarkan pada aspek perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan. Strategi ini mendukung pembangunan Kota Malang terutama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau menurut persepsi penggunanya. Metode yang digunakan adalah penyebaran kuesioner yang memuat pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui elemen apa yang secara jelas menentukan pengelolaan ruang terbuka di Kota Malang. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner menunjukkan bahwa aspek utama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Malang adalah aspek perencanaan yang kemudian diikuti aspek lain yaitu kelembagaan, koordinasi, pendanaan dan terakhir sumber daya manusia. Secara khusus pada aspek perencanaan elemen utama adalah keseimbangan ekosistem.

Sebagai kesimpulan maka dapat disusun rekomendasi pengelolaan menurut pandangan pengguna yang menyangkut urutan strategi perencanaan berbasis keseimbangan ekologi diikuti strategi kelembagaan berbasis evaluasi, aspek koordinasi berbasis tata guna lahan, aspek pendanaan berbasis pemerintah dan terakhir aspek sumber daya manusia berbasis proporsi jumlah tenaga pengelola di tingkat pusat dan daerah.

Kata Kunci : pengelolaan ruang terbuka hijau, keseimbangan ekologi

MANAGEMENT ASPECT OF GREEN OPEN SPACE IN MALANG CITY.

ABSTRACT

Open green space can be understood as the main element of a city ecosystem which is made up of three important things such as vehicle parking lot, city forest and agricultural area which has function such as ecological, social and economical. The condition of open green space in a city is closely related to the management of the city itself. In its management, what it aims at, what should be done to achieve it, and rationally made decisions should be included in such a way that the strategy how to manage it reflects strategic policies and implementation of decisions.

As far as the case in Malang is concerned, as a whole, the strategy of managing open green space is wholly based the aspects of planning, institutionalization, human resources, coordination and funding.

This strategy has supported the development of Malang City especially the management of open green space in accordance with the users' perception. The method which was employed was that the questionnaire containing the questions designed to identify the elements which had clearly determined the management of open green space in Malang City was spread. The findings show that the important aspects in managing the open green space in Malang City are the aspects of planning, institutionalization, funding and human resources. In particular, the aspect of the main element planning is the balance in ecosystem.

In conclusion, it can be recommended that, viewed from the point of view of the users, the management which is related to the sequence of the strategy of planning is based on the balance in ecology followed by the strategy of institutionalization which is based on evaluation, the aspect of coordination which is based on the utilization of space, the aspect of funding which is based on the government and the aspect of human resources which is based on the proportion of the number of managing work force in the central and regional levels.

Key words: the management of green open space, the balance in ecology

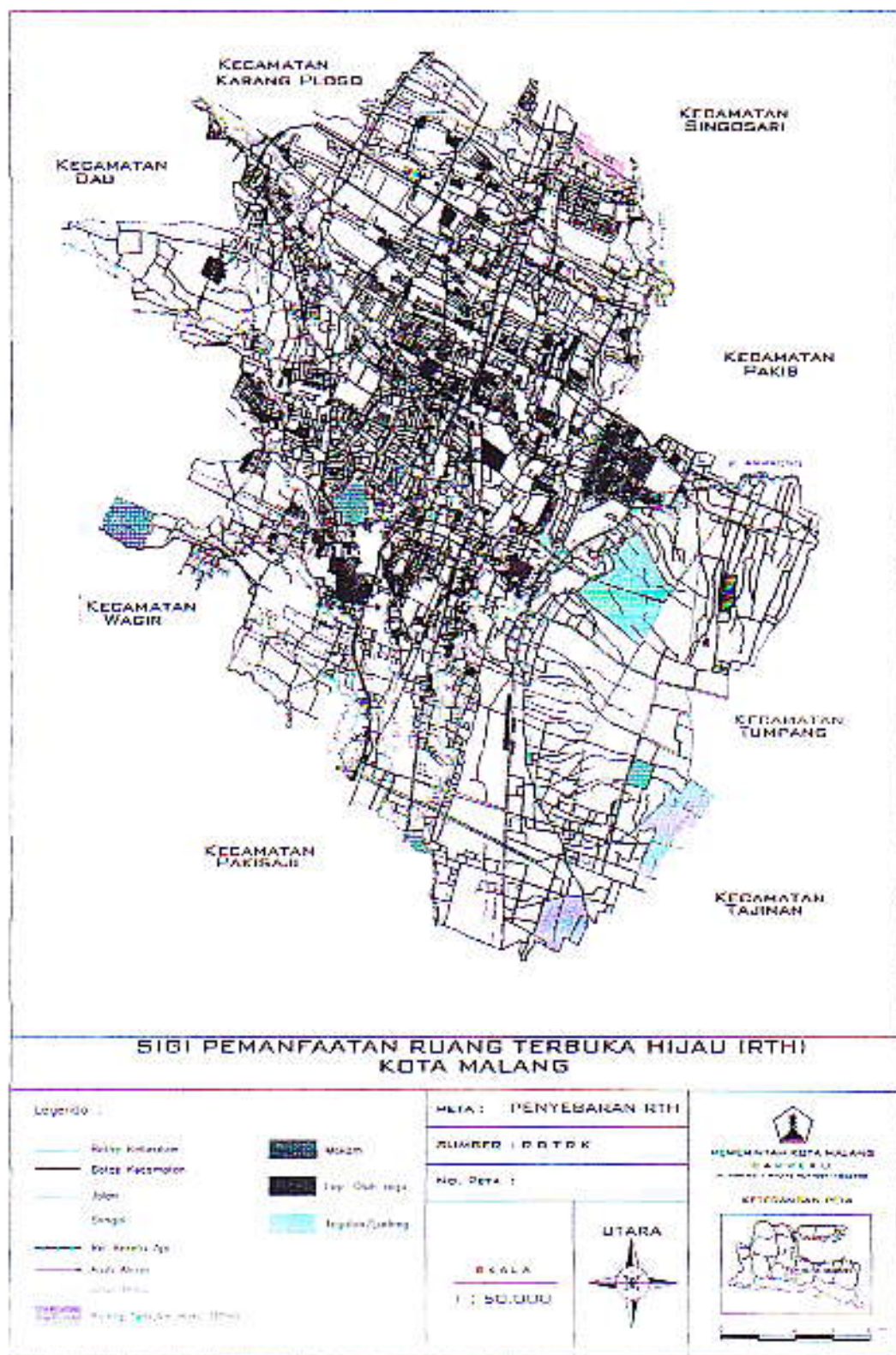
PENDAHULUAN

Pembangunan Kota Malang dengan segala aktifitasnya menyebabkan berkembangnya kota, namun pada sisi lain juga menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan kota. Pembangunan fisik kota cenderung terus membengkak, menimbulkan fenomena struktur fisik kota menuju arah maksimal, ruang terbuka hijau menuju arah minimal; serta kecenderungan mengubah wajah lingkungan kota. Disisi lain, ruang terbuka hijau dapat berperan dalam memberikan perlindungan dan peningkatan bagi lingkungan alami, serta memberikan keuntungan dalam jangka panjang (Scottish Executive Publications, 2006). Keuntungan dari keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan menurut Roseland (1998), dapat ditinjau dari sudut keuntungan ekonomi yaitu ruang terbuka hijau secara signifikan dapat mengurangi biaya penggunaan energi dan air. Vegetasi dapat mengendalikan cahaya, keteduhan, angin dan silauan cahaya. Dapat mendinginkan bangunan pada musim panas dan mencegah kehilangan panas di dalam musim dingin (Roseland, 1998; Miller, 1997; CMHC, 1982). Dengan menempatkan vegetasi yang tepat dalam hubungan dengan lingkup bangunan, 20-25% dari rerata biaya energi kediaman dapat disipikan dan diamankan. Ditinjau dari sudut manfaat ekologis dapat dikatakan bahwa, ruang terbuka hijau menyediakan habitat untuk binatang2 seperti berbagai burung, ikan, dan lain-lain. Menurut Dorward (1990), ruang terbuka hijau juga menyediakan jalur hijau dan koridor-koridor untuk menghubungkan habitat-habitat tersebut. Dapat mencegah erosi tanah (CMHC, 1982), menyerap air hujan,

dengan demikian meningkatkan sistem drainase (Roseland, 1998).

Permasalahan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Malang adalah belum terintegrasinya institusi pengelolaan RTH di Malang. Pengelolaan masih dilakukan partial dan sektoral, belum efisien dan efektif dalam rangka menghasilkan kualitas dan kuantitas RTH, serta belum melibatkan semua stakeholder termasuk para ilmuwan. Ditemui banyak fakta bahwa dalam pengelolaan ruang terbuka hijau telah berubah fungsi menjadi penggunaan lain (Ditjen Bangda Depdagri, 1994). Ruang terbuka hijau tampaknya masih mempunyai makna pelengkap / penyempurna bagi perkotaan, sehingga ruang terbuka hijau dianggap hanya sebagai penambah estetika lingkungan. Kompetisi penggunaan lahan di perkotaan banyak dipengaruhi oleh mekanisme pasar, sehingga banyak terjadi perubahan penggunaan lahan terbuka hijau menjadi area permukiman, pertokoan, hotel, pompa bensin, restoran. Kurangnya pengendalian aparat pemerintahan terhadap perkembangan Kota Malang serta keterbatasan kemampuan sumber manusia instansi pengelolaan pemerintah dalam hal wawasan profesionalismenya merupakan hal permasalahan utama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Hal ini ditambah beragamnya pemahaman fungsi dan pendeskripsian ruang terbuka hijau dari instansi Dinas Pertamanan, Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan yang terkait dalam pengelolaannya. Faktor lain adalah masalah ketersediaan tanah di perkotaan sebagai lahan hijau yang terbatas dan masalah pendanaan pembangunan ruang terbuka hijau. Dari uraian di atas ditemukan adanya indikasi penyebab permasalahan ruang

terbuka hijau yang menyangkut aspek pengelolaan ruang terbuka hijau di Malang.





RTH Alum -Alum Kota Malang



RTH depan hotel Cakra Malang

PEMBAHASAN

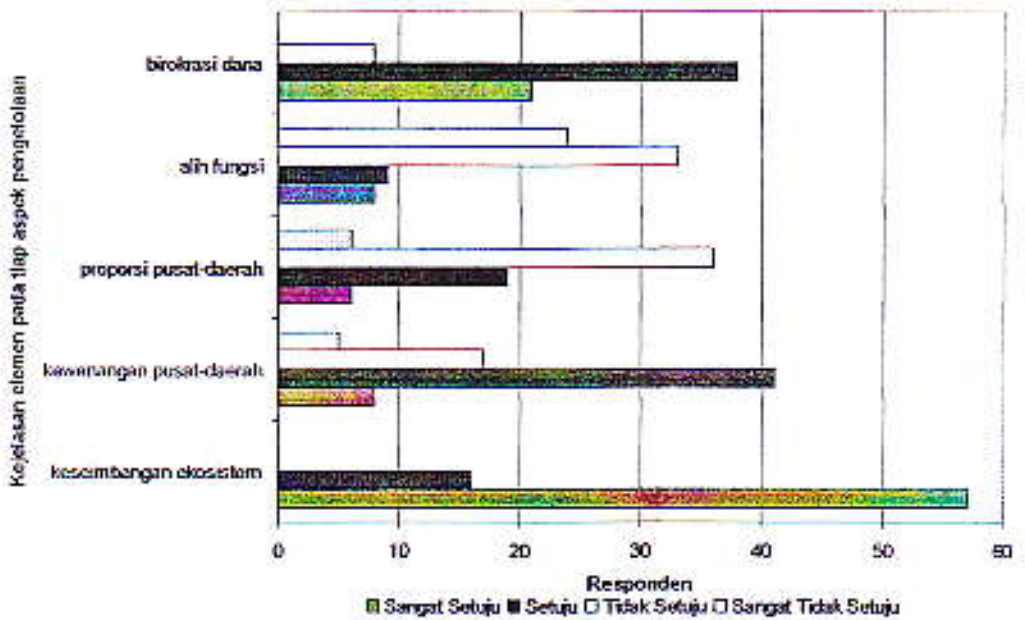
Pengelolaan ruang terbuka hijau di Malang melibatkan beberapa instansi pemerintah daerah antara lain: dinas pertamanan kota, Bupesa dan Departemen Pekerjaan Umum. Secara umum ruang terbuka hijau diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Perkembangan fisik di Kota Malang dalam 5 tahun ini mengalami perkembangan pesat, terutama perdagangan (kawasan pusat kota) dan perumahan (Malang bagian Timur Laut dan Malang bagian Barat Laut). Tapi perkembangan tersebut tidak merata, dimana pada kawasan timur dan selatan (Malang bagian Tenggara dan Malang bagian Barat Daya) perkembangannya tidak terlalu cepat (bahkan tidak berkembang sesuai dengan rencana RTRW lama). Sehingga terjadi beberapa penyimpangan antara rencana tata ruang yang ada (RTRW Kota Malang tahun 1993) dengan kondisi eksisting. Seiring dengan perkembangan fisik kota, Kota Malang kekurangan ruang terbuka hijau. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala/masalah yaitu banyaknya taman kurang terawat, kurangnya lapangan olah raga, banyaknya perumahan yang menghabiskan seluruh kavling rumahnya untuk dibangun, banyaknya

perumahan atau jalan perumahan tidak ada pepohonan peneduhya dan sebagainya

Pada bagian ini akan dievaluasi secara menyeluruh elemen-elemen apa yang secara jelas nampak pada masing-masing aspek pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Malang. Kejelasan elemen ditunjukkan oleh perbandingan yang signifikan antara jawaban sangat setuju dan setuju dengan jawaban sangat tidak setuju dan setuju. Secara umum pada aspek perencanaan merupakan elemen keseimbangan ekosistem merupakan aspek yang paling jelas. Pada aspek kelembagaan elemen kewenangan pusat dan daerah merupakan elemen yang paling jelas. Sedangkan pada aspek sumber daya manusia elemen terjelas adalah proporsi SDM di pusat dan daerah. Pada aspek koordinasi elemen terjelas adalah alih fungsi. Pada bagian pendanaan, aspek terjelas adalah pada birokrasi pemerintah. Untuk pembahasan selanjutnya maka elemen-elemen tersebut diperbandingkan seperti pada gambar 1.

Berdasarkan pada gambar 1 maka dapat dilihat aspek perencanaan dalam hal ini elemen ekologi aspek mempunyai proporsi yang jelas dibandingkan yang lain. Sedangkan pada urutan kedua adalah aspek kelembagaan yang menyangkut elemen kewenangan pusat dan daerah. Ketiga adalah aspek koordinasi dalam hal ini elemen alih fungsi. Keempat adalah aspek pendanaan yang menyangkut elemen birokrasi dana dan yang terakhir adalah aspek sumber daya manusia.

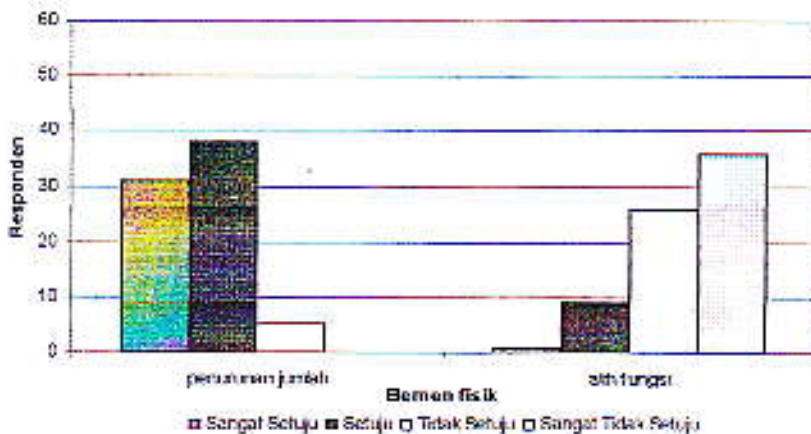
Untuk menjelaskan lebih mendalam tentang hasil persepsi masyarakat tentang aspek perencanaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau maka berdasarkan penelitian terdahulu terdapat empat elemen perencanaan pengelolaan yang mempengaruhi ruang terbuka kota yaitu, elemen fisik, ekologi, partisipasi dan keterbukaan. Keempat elemen tersebut dijabarkan dalam sejumlah pertanyaan dalam questioner yang disebarikan kepada lebih dari 100 responden. Berdasarkan kuesioner diperoleh hasil komponen utama fisik ruang terbuka yang terlihat jelas menurut pengguna adalah adanya penurunan jumlah ruang terbuka hijau di Kota Malang dan alih fungsi ruang terbuka hijau (gambar 2). Sebagian besar responden (lebih dari 90 persen) setuju bahwa terjadi penurunan jumlah ruang terbuka hijau di Kota Malang.



Gambar 1. Kejelasan elemen pada tiap aspek pengelolaan

Hal lain adalah sebagian besar pengguna tidak setuju apabila ruang terbuka yang ada dialih fungsikan untuk tata guna atau fungsi yang lain. Jumlah pengguna yang tidak setuju alih fungsi ini mencapai lebih dari 80 persen. Hubungan antara penurunan ruang terbuka hijau dan alih fungsinya dapat dikatakan sangat erat. Pada umumnya penurunan jumlah ruang terbuka hijau disebabkan alih fungsi.

Berdasarkan perbandingan antara dua elemen fisik tersebut maka dapat disimpulkan pengguna dalam hal ini penduduk Kota Malang mengharapkan tidak adanya alih fungsi ruang terbuka hijau yang berakibat penurunan jumlahnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Morano (2003) yang menyatakan, ada hubungan yang sama antara fungsi ruang terbuka hijau kota dengan kualitas fisik kota.



Gambar 2. Elemen fisik dalam aspek perencanaan



RTH Jalan Ijen Malang



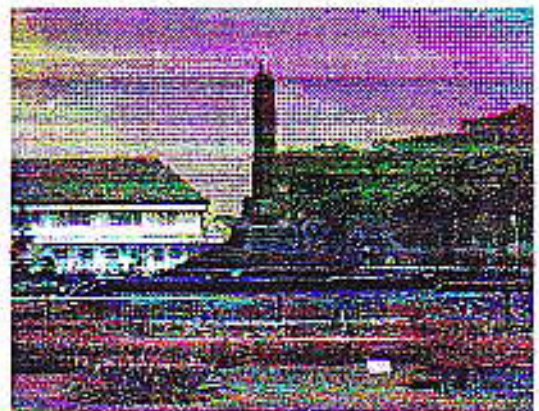
RTH Jalan Merbau Malang

Pengelolaan ruang terbuka hijau adalah pendekatan yang menyeluruh terutama pada kota-kota di negara-negara berkembang. Pemda adalah daya penggerak yang oleh karena itu difihat ketika yang diperlukan untuk mengintegrasikan seluruh pemain dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Pengalaman itu mungkin mencerminkan proses dalam kaitan dengan:

- Adanya satu strategi pengelolaan kota terintegrasi
- Memfokuskan pada keduanya, yaitu urban dan tantangan pengembangan institusional
- Memastikan hubungan yang selaras antara perencanaan dan penganggaran.

Beberapa unsur utama akan disajikan sebagai bagian dari aspek manajemen strategis untuk mengarahkan pengelolaan ruang terbuka hijau kota. Pertama, manajemen strategis menekankan pentingnya *stakeholder*, mencakup komunitas dan agensi terlibat dalam semua proses implementasi perencanaan agar rencana mau mendengarkan kebutuhan komunitas. Dengan begitu, akan mendorong transparansi dan tanggung-jawab. Kedua, proses manajemen strategis adalah satu

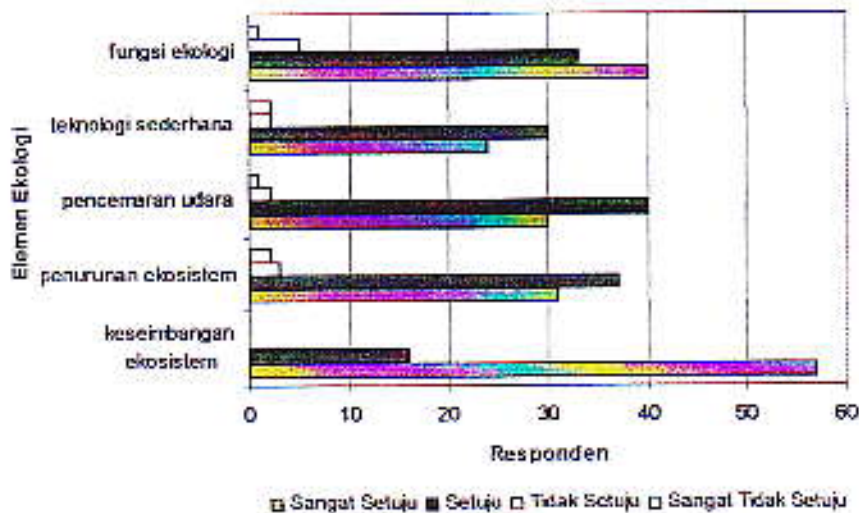
keputusan dan tindakan tentang apa yang harus dikerjakan, mengapa untuk melakukannya dan siapa harus melakukan itu. Itu menekankan bahwa pengukuran efektivitas strategi dan tindakan dalam mencapai objektif tata kota harus memfokuskan pada kemajuan dari semua aspek publik wellbeing mencakup fisik, ekonomi, sosial, dimensi lingkungan dan institusional. Ketiga, manajemen strategis bertanggung-jawab terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan suatu kota. Sebuah pemahaman jelas dari lingkungan eksternal, dan kekuatan internal yang memungkinkan sumber daya manusia untuk memberikan perubahan didalam tata kota. Keempat, manajemen strategis memungkinkan monitoring evaluasi yang efektif (internal) dan (eksternal). Akhirnya, manajemen strategis mengenali bahwa keberhasilan implementasi dari strategi memerlukan dukungan pembiayaan dari institusi tata kelola yang meliputi kerjasama di antara semua tingkatan pemerintah, sektor swasta dan komunitas. Itu mendorong dan memberikan fasilitas keterlibatan dari semua stakeholder serta kelompok minat dalam semua langkah-langkah manajemen tata kota. Sebagai hasilnya, kebijakan pengembangan kota lebih responsive pada nilai komunitas dan oleh karena itu mempunyai kesempatan untuk berhasil. Lima aspek strategis yang digunakan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kota, mengikuti penelitian sebelumnya tentang variabel, aspek pengelolaan kota yaitu: perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pembiayaan.



RTH Alun-Alun Bunder Malang

Elemen ekologi merupakan salah satu faktor penting dalam aspek perencanaan. Hal ini dapat dilihat dari persepsi pengguna ruang terbuka hijau yang setuju akan pentingnya ruang terbuka hijau sebagai pembentuk kualitas ekologi kota. Dilihat dari lima pertanyaan yang diajukan menyangkut aspek ekologi maka keseimbangan ekologi merupakan faktor utama. Artinya kegunaan utama keberadaan ruang terbuka hijau menurut persepsi pengguna adalah sebagai

keseimbangan ekosistem kota. Hal ini dapat dilihat dari prosentase yang sangat setuju dan setuju mencapai 100%. Elemen ekologi lain yang menonjol dan dirasakan oleh pengguna adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah faktor yang paling dirasakan akibat terjadinya ketidak seimbangan ekosistem kota. Elemen pencemaran udara mempunyai ranking kedua setelah kesadaran keseimbangan ekologi. Kedua hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3



Gambar 3. Elemen ekologi dalam aspek perencanaan

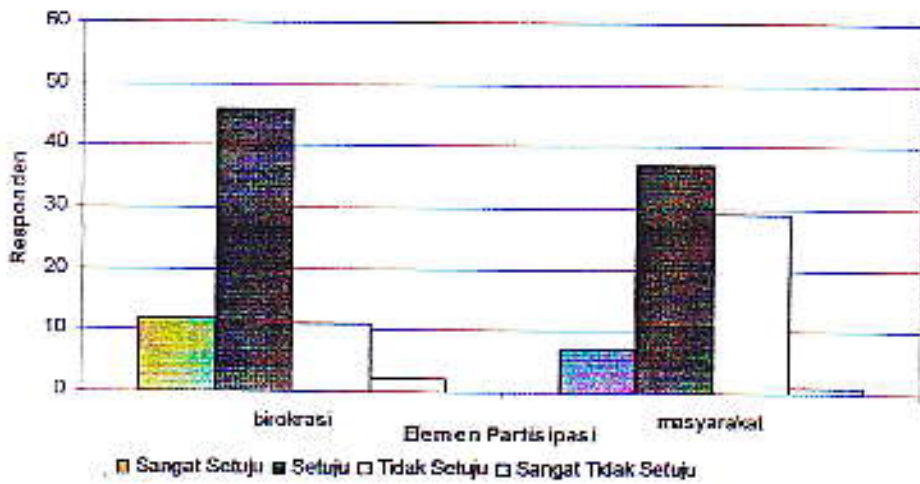
Komponen pertama (keseimbangan) dan kedua (pencemaran udara) merupakan salah satu bentuk hubungan sebab akibat, hal ini didukung komponen ketiga dan keempat sebagai komponen dominan yang dirasakan pengguna yaitu penurunan ekosistem dan pemahaman arti penting fungsi ekologi. Komponen teknologi sederhana mempunyai jumlah prosentase yang paling kecil berkait dengan tingkat pemahaman pengguna tentang teknologi sederhana yang dapat menggantikan keberadaan ruang terbuka hijau. Tingkat pemahaman ini berpengaruh terhadap jumlah yang mengisi pertanyaan tentang ini. Apabila dikaitkan dengan penelitian sebelumnya oleh Li et al. (2005) yang mengembangkan satu kerangka konseptual menyeluruh untuk ruang terbuka hijau di Cina dengan berbasis pada prinsip ekologi lanskap. Maka hal utama yang harus dilakukan adalah dalam aspek perencanaan adalah bagaimana menetapkan rencana ruang terbuka hijau kota agar mencapai jangka panjang dan berkelanjutan.

Dengan hasil questioner diatas maka prioritas yang harus dilakukan adalah menjaga keseimbangan ekosistem kota sebagai dasar mengurangi pencemaran udara dengan cara mencegah penurunan jumlah ruang terbuka hijau dan mengembalikan lagi fungsi ekologi ruang terbuka hijau melalui teknologi sederhana.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur utama perencanaan ruang terbuka hijau serta menjaga kualitasnya. Aspek perencanaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kota berdasarkan persepsi pengguna menyangkut hal yang berbau birokrasi artinya selama ini aspek perencanaan ruang terbuka hijau lebih cenderung top down atau dari pusat dibanding bottom up atau mengakomodasi keinginan masyarakat. Berdasarkan hasil questioner maka aspek yang jelas terjadi adalah menurut pengguna aspek partisipasi masyarakat kurang karena adanya faktor birokrasi. Hal ini dapat dilihat dari prosentasi persepsi pengguna yang sangat setuju dan setuju aspek birokrasi yang

menghambat perencanaan ruang terbuka hijau mencapai lebih 80 persen. Ketidakjelasan peran serta masyarakat terlihat masih belum jelas selangka terjadi perbedaan yang tidak mencolok antara yang setuju dan tidak setuju terhadap faktor eksternal dalam hal ini masyarakat dalam perencanaan ruang terbuka hijau kota. Apabila di bandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Brauch (1970) maka diperlukan perencanaan

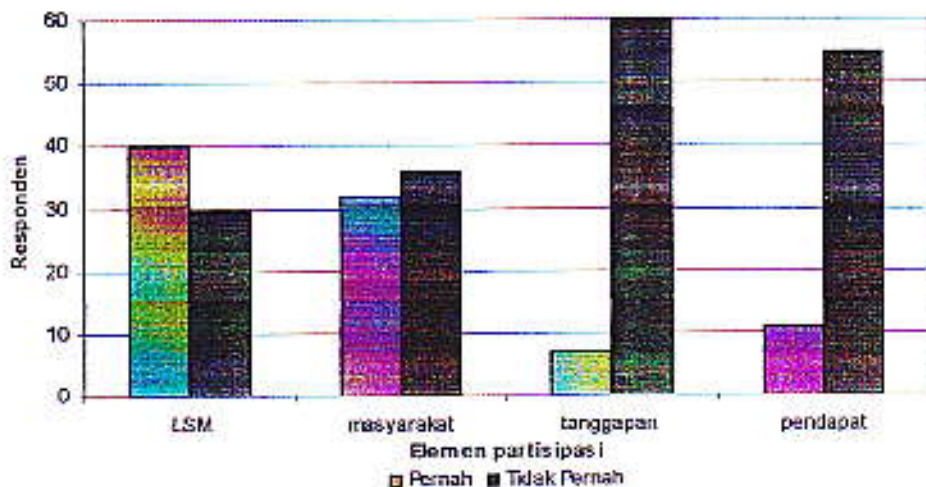
terus menerus dan fleksibel dalam perencanaan ruang terbuka hijau kota. Pada area tertentu memang terdapat kewenangan pemerintah untuk merencanakan ruang terbuka hijau tetapi pada area lebih luas keterlibatan masyarakat merupakan hal yang mutlak agar perencanaan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna dan menghadapi kompleksitas pertumbuhan kota.



Gambar 4. Elemen partisipasi dalam aspek perencanaan

Berdasarkan hasil kuesioner yang menyangkut elemen partisipasi terlihat bahwa keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat lebih jelas dibanding keterlibatan masyarakat. Hal ini menunjukkan peran LSM di Malang dalam perencanaan ruang terbuka hijau cukup berguna dan diperhitungkan. Keterlibatan masyarakat masih kurang dapat dilihat dari prosentase aspek tanggapan dan pencapaian yang diminta dalam perencanaan ruang terbuka hijau. Hampir lebih dari 60 persen dan 50 persen pengguna merasa tidak pernah diminta

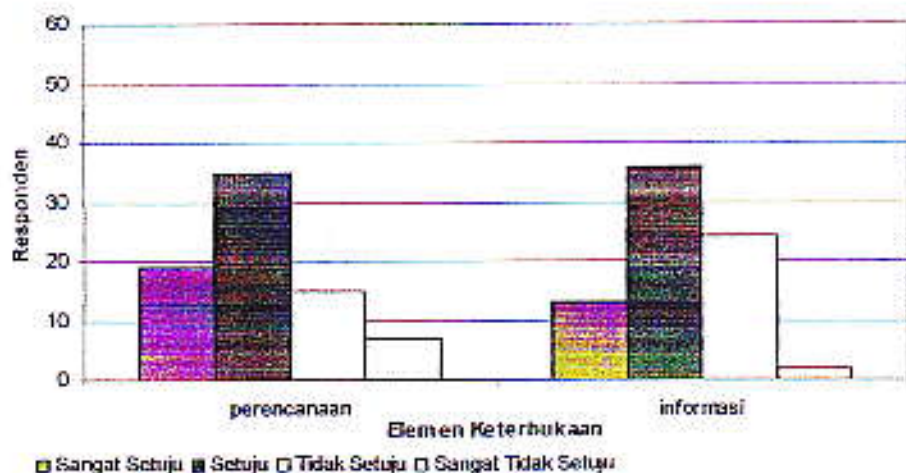
tanggapan dan pendapatnya untuk perencanaan ruang terbuka hijau. Artinya partisipasi masyarakat adalah secara perwakilan dan bukan individu. Hal ini terkait dengan sistem perencanaan yang masih harus diperbaiki menyangkut bagaimana keterlibatan masyarakat dapat secara menyeluruh terwakili. Apakah dengan penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat memberi saran secara aktif maupun dengan pemberian penghargaan atas partisipasi masyarakat.



Gambar 5. Elemen partisipasi kegiatan dalam aspek perencanaan

Elemen keterbukaan merupakan salah satu aspek perencanaan terutama di era sekarang ini. Masyarakat sudah mulai sadar dan menuntut keterbukaan pemerintah khususnya dalam pengelolaan kota. Hal ini dapat dilihat dari pendapat responden tentang keterbukaan perencanaan dan penyebaran informasi ruang terbuka hijau di Kota Malang. Berdasarkan elemen keterbukaan perencanaan dapat dilihat hampir 60 persen pengguna

setuju terhadap hal itu. Sedangkan pada elemen informasi hampir 50 persen pengguna sangat setuju dan setuju terhadap keterbukaan informasi. Dilihat dari prosentase tersebut dapat di tengarai bahwa pengguna mulai bersikap kritis terhadap keterbukaan rencana dan bukan hanya sekedar informasi saja artinya harus ada penjelasan lebih terhadap perencanaan ruang terbuka hijau.



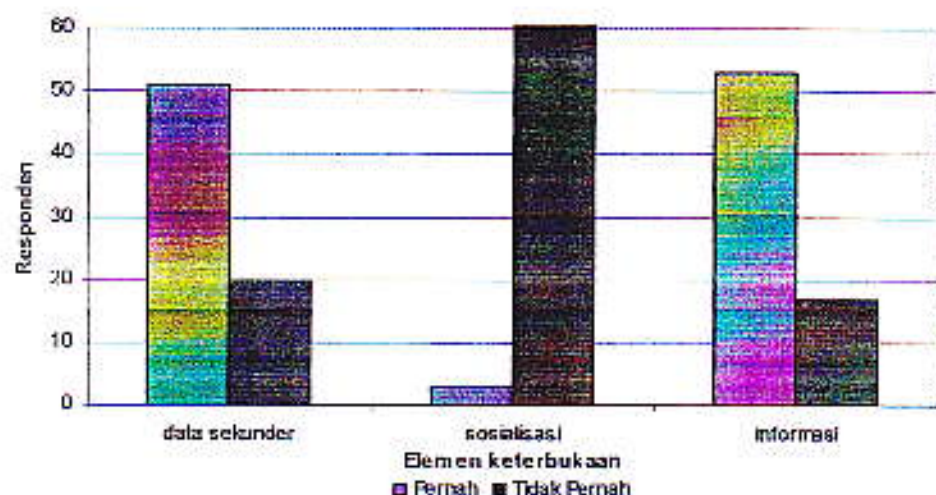
Gambar 6. Elemen keterbukaan dalam aspek perencanaan

Berdasarkan hasil kuesioner terlihat bahwa kendala utama dalam keterbukaan aspek perencanaan ruang terbuka hijau adalah sosialisasi. Aspek sosialisasi dapat dikatakan kurang karena hampir 90 persen responden mengatakan tidak pernah ada sosialisasi

reencana. Meskipun pada aspek informasi hampir 50 persen mengatakan pernah mendengar tentang perencanaan ruang terbuka hijau. Hal ini didukung oleh fakta bahwa sebagian besar responden pernah menghadapi masalah dalam mencari data sekunder tentang

rencana ruang terbuka hijau di Kota Malang. Artinya secara informasi cukup memadai

tetapi penjelasan lebih dalam tentang aspek perencanaan masih belum terbuka.



Gambar 7. Elemen keterbukaan kegiatan dalam aspek perencanaan

Berdasarkan hasil diatas maka apabila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan Chakrabarty (2001) maka persamaan yang ada adalah terdapat kemampuan reaksi sosial dan evaluasi sosial didalam perencanaan ruang terbuka hijau perkotaan. Artinya masyarakat sebagai pengguna sudah bersikap kritis yang diwujudkan dalam sikap reaksi dan evaluasi terhadap rencana pengelolaan kota. Hal ini menuntut pemerintah sebagai aktor perencanaan kota untuk tidak sekedar menyebarkan informasi tetapi memerlukan sosialisasi. Selinggga intervensi dan peraturan pemerintah mempunyai kebebasan yang lebih besar dan fleksibilitas dalam meningkatkan kinerja sektor perkotaan secara keseluruhan.

Berdasarkan data kejelasan elemen dan aspek pengelolaan diatas maka dapat dibuat sebuah strategi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Malang secara lebih sistematis. Strategi ini didasarkan pada urutan kejelasan elemen dan aspek pengelolaan. Strategi pertama adalah penangunan aspek perencanaan yang berbasis keseimbangan ekologi. Hal ini didasarkan bahwa pada aspek perencanaan elemen yang dominan adalah keseimbangan ekologi. Apabila dikaitkan dengan elemen lain maka persepsi ini masih pada tataran kondisi ideal, sehingga pada implementasinya belum berjalan. Sehingga

masih diperlukan identifikasi faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam perencanaan yang lebih praktis. Setelah aspek perencanaan adalah aspek kelembagaan. Langkah utama aspek kelembagaan adalah kejelasan kewenangan pusat dan daerah. Dengan adanya kejelasan kewenangan tersebut maka penimusan peraturan daerah sebagai landasan hukum pengelolaan dan mekanisme birokrasi akan berjalan lebih baik. Setelah langkah kelembagaan dijalankan maka dilakukan langkah berikutnya yaitu aspek koordinasi untuk meminimalkan alih fungsi lahan ruang terbuka hijau dan mengoptimalkan kemanfaatan ruang terbuka hijau yang ada. Pada bagian selanjutnya sistem koordinasi yang ada didukung oleh birokrasi dana yang baik. Dengan adanya birokrasi pendanaan yang baik maka peningkatan sumberdaya manusia baik di tingkat pusat dan daerah akan berjalan sinergi.

KESIMPULAN

Keberadaan ruang terbuka hijau Kota Malang sangat ditentukan oleh pengelolaannya. Tanggung jawab pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut idealnya di lakukan bersama antara pemerintah kota, swasta dan masyarakat. Penelitian ini mencoba menggali aspek-aspek pengelolaan ruang terbuka hijau seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat

Untuk membatasi aspek-aspek tersebut maka dilakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau. Berdasarkan kajian terdahulu dapat disimpulkan aspek pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi aspek perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan.

Aspek-aspek tersebut dijabarkan dalam bentuk pertanyaan kuesioner dan disebarkan pada responden untuk mengetahui pemahaman dan pandangan mereka terhadap aspek pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Malang. Kejelasan elemen dan aspek pengelolaan menjadi hasil utama penelitian ini yang dijelaskan pada simpulan-simpulan dibawah ini sesuai urutan kejelasannya.

1. Aspek perencanaan mempunyai kejelasan tertinggi menurut pandangan pengguna ruang terbuka hijau. Aspek ini meliputi elemen-elemen pendukung dengan urutan terjelas sebagai berikut: elemen ekologi, elemen fisik, keterbukaan dan partisipasi. Pada komponen yang lebih rinci elemen ekologi yang berpengaruh meliputi keseimbangan ekologi, pencemaran udara, penurunan kualitas ekologi, fungsi ekologi dan terakhir teknologi. Sedangkan elemen fisik meliputi penurunan jumlah dan alih fungsi lahan. Pada elemen keterbukaan maka komponen yang nampak jelas adalah perencanaan dan informasi. Terakhir adalah elemen partisipasi yang meliputi birokrasi dan masyarakat.
2. Aspek Kelembagaan meliputi elemen-elemen pendukung dengan urutan terjelas sebagai berikut: elemen evaluasi dan pembuat keputusan. Pada elemen evaluasi faktor yang berpengaruh adalah peraturan daerah dan mekanisme birokrasi sedangkan pada pembuat keputusan adalah pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.
3. Aspek Koordinasi meliputi elemen-elemen pendukung dengan urutan terjelas sebagai berikut: tata guna lahan, keputusan, informasi dan otoritas. Elemen tata guna lahan terutama pada faktor alih fungsi lahan sedangkan pada keputusan lebih pada aturan yang tegas. Pada elemen informasi mencakup aspek larangan. Sedangkan pada elemen otoritas meliputi perijinan dan aspek tumpang tindih.

4. Aspek Pendanaan meliputi elemen-elemen pendukung dengan urutan terjelas sebagai berikut: pemerintah, masyarakat dan swasta. Pada elemen pemerintah hal yang terlihat jelas adalah brokrasi dana, alokasi anggaran, pencairan dana dan kewenangan. Sedangkan pada elemen masyarakat faktor sumbangan menjadi satu-satunya elemen yang mudah dilihat. Pada elemen swasta urutan yang jelas adalah sumbangan dan pajak.

5. Aspek Sumberdaya Manusia meliputi elemen-elemen pendukung dengan urutan terjelas sebagai berikut: jumlah dan kualitas. Pada aspek jumlah mencakup kuantitas dan proporsi jumlah SDM di pusat dan daerah.

Ringkasnya simpulan yang dapat dirumuskan terkait dengan tujuan penelitian adalah bahwa aspek pengelolaan yang menyebabkan kurang berhasilnya pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Malang menurut pengguna adalah aspek perencanaan, kelembagaan, koordinasi, pendanaan dan sumber daya manusia. Dengan aspek dominan pengelolaan adalah aspek perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ann Van Herzele, Torsten Wiedemann, *A monitoring tool for the provision of accessible and attractive urban green spaces Landscape and Urban Planning 63*, 109-126, 2003.
- Aurelia Bengochea Moranchó, *A hedonic valuation of urban green areas Landscape and Urban Planning 66*: 35-41, 2003.
- Beatley, T., *Green Urbanism: Learning from European Cities*. Island Press, Washington, DC., 2000.
- Bonsignore, R.E., *The diversity of green spaces. Design Center for American urban Landscape. Design Brief, number 2/August Design Centre for the American Urban Landscape*. University of Minnesota, Minneapolis. 2003. Available at <http://www.designcenter.umn.edu/reference/publications/pdfs/dh2.pdf> (accessed 15 April 2007).

- Carrus, G., Passafaro, P., Bonnes, M., *Environmentalism, authoritarianism, and ethnocentrism: an attitude toward urban green space*. *Bollettino di Psicologia Applicata* 242, 3-12, 2004.
- Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Nacem, S., O'Neill, R.V., Paruelo, J., Raskins, R.G., Sutton, P., Van den Belt, M., *The value of the world's ecosystem services and natural capital*. *Nature* 387, 253-260, 1997.
- Feng Li, Ruisong Wang, Juergen Paulussen, Xusheng Liu, *Comprehensive concept planning of urban greening based on ecological principles: a case study in Beijing, China*. *Landscape and Urban Planning* 72 (2005) 325-336, 2005.
- Gilbert, O.L., *The Ecology of Urban Habitat*. Chapman & Hall, London, 1989.
- Haaren, C., von Reich, M., *The German way to greenways and habitat networks*. *Landscape and Urban Planning* 76, 7-22, 2006.
- Giovanni Sanesi, Francesco Chiarello, *Residents and urban green spaces: The case of Bari*. *Urban Forestry & Urban Greening* 4:125-134, 2006.
- Giovanni Sanesi, Raffaele Laforzezza, Mirilia Botutes, Giuseppe Carrus, *Comparison of two different approaches for assessing the psychological and social dimensions of green spaces*. *Urban Forestry & Urban Greening* 5, 121-129, 2006.
- Jim, C.Y., Chen, S.W., *Comprehensive green space planning based on landscape ecology principles in compact Nanjing city, China*. *Landscape and Urban Planning* 65, 95-116, 2003.
- John P. Boentje, Mikhail S. Blinnikov, *Post-Soviet forest fragmentation and loss in the Green Belt around Moscow, Russia (1991-2001): a remote sensing perspective*. *Landscape and Urban Planning* 82: 208-221, 2007.
- Kjell Nilsson, Ulrika Akerlund, Cecil C. Konijnendijk, Alexander Alekseev, Ole H. Caspersen, Susanne Guldager, Evgeny Kuznetsov, Alexander Mezenko, Andrey Selikhovkin, *Implementing urban greening aid projects - The case of St. Petersburg, Russia*. *Urban Forestry & Urban Greening* 6 (2007) 93-101, 2007.
- Klaus Seeland, Simone Nicole, *Public green space and disabled users*. *Urban Forestry & Urban Greening* 5: 29-34, 2006.
- Konijnendijk, C.C., Randrup, T.B. (Eds.), *Editorial, Urban Forestry and Urban Greening* 1 (1), 1-4, 2002.
- Li, F., Wang, R., Paulussen, J., Lui, X., *Comprehensive concept planning of urban greening based on ecological principles: a case study in Beijing, China*. *Landscape and Urban Planning* 72, 325-336, 2005.
- Lohr, V.I., Pearson-Mims, C.H., Tamai, J., Dillman, D.A., *How urban residents rate and rank the benefits and problems associated with trees in cities*. *Journal of Arboriculture* 30, 28-35, 2004.
- Marco Amati, Makoto Yokohari, *Temporal changes and local variations in the functions of London's green belt*. *Landscape and Urban Planning* 75 (2006) 125-142, 2006.
- Nilsson, K., *Urban greening as a vehicle for healthy and sustainable development*. In: Working paper for design and appraisal of capacity development activities in urban environmental management. DANIDA Working Group on Experiences of Analytical Approaches to Institutional Capacity Development within the Field of Urban Environmental Management. DANIDA, Copenhagen, pp. 55-62, 2004.
- Pham Duc Uy, Nobukazu Nakagoshi, *Application of land suitability analysis and landscape ecology to urban greenspace planning in Hanoi, Vietnam*. *Urban Forestry & Urban Greening*, 2007.
- Paulcit, S., Kaliszuk, E., *Green structure patterns - Green structure and urban planning*. In: European Commission.

2005. Report of COST Action C11 – Green, 2005.

Romesburg, H.C., *Cluster Analysis for Researchers*. R.E. Krieger, Florida, 1990.

Structure and Urban Planning. Available at <http://www.map21hd.com/COSTC11/S> (accessed 1 March 2007).

Siematycki, J., *A comparison of mail, telephone and home interview strategies for household health surveys*, *American Journal of Public Health* 69, 238–244, 1979.

Van Veenhuizen, R., Konijnendijk, C., Gauthier, M. (Eds.), *Trees and Cities – Growing together*. Theme issue. *Urban Agriculture Magazine* (13), 2004.



JURNAL PERMUKIMAN

NATAH

VOLUME 7 NOMOR 2 AGUSTUS 2009

di atas nun jauh di langit
ada akasa
di bawah, dalam sarang bumi
ada pertiwi
maka, di tengah
adalah pertemuan
mencipta ruang kosong penuh makna
mendengarkan kidung semesta dan insani
keselarasan nan abadi

natah,
diantara tautan ruang meruang
diantara tautan ruang menghuni
dan,
diantara tautan ruang mengkota
membangkitkan manusia
dalam religi dan duniawi

JURNAL PERMUKIMAN NATAH

Natah dalam arsitektur tradisional Bali adalah suatu ruang kosong di tengah-tengah lingkungan terbangun, seperti rumah, desa, ataupun kota. *Natah* di dalam rumah terbentuk oleh bangunan yang mengelilinginya, *natah* di dalam desa terbentuk oleh sederetan rumah penduduk dengan fasilitasnya, dan *natah* di dalam kota terbentuk oleh pusat kota dengan fasilitasnya. *Natah* merupakan suatu pusat orientasi bangunan dan jalur sirkulasi manusia. *Natah* berfungsi sebagai aktivitas profan dan ritual keagamaan. *Natah* memiliki makna kekosongan, keselarasan antara mikrokosmos dan makrokosmos serta makna pertemuan antara akasa-alam atas dan pertiwi-alam bawah (*purusa dan pradana*).

Natah juga diartikan sebagai suatu elemen arsitektur yang memiliki makna universal sebagai media aktivitas bagi insan arsitektur untuk berkarya. Melalui Jurnal Permukiman "Natah" yang dikonotasikan dengan "*Nucleus Articles of Truth Architecture Human Settlement*" dapat dijadikan sebagai media kumpulan karya tulis arsitektur dan permukiman oleh para pelaku arsitektur untuk membangun dan menumbuhkembangkan kreativitas dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengembangan profesi.